

PERBANDINGAN E-GOVERNMENT DI NEGARA INDONESIA DAN
AUSTRALIAWinda Agustin¹, Aminullah²¹Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia²Administrasi Publik, Universitas Yudharta Pasuruan, IndonesiaEmail: wagustin159@gmail.com , aminullah@yudharta.ac.ad

E-Issn: 3063-8313

Received: Desember 2025

Accepted: Desember 2025

Published: Januari 2026

Abstract :

This study compares e-government implementation between Indonesia and Australia to identify factors influencing the success of digital transformation in both countries. Using a qualitative approach with a comparative study method, this study analyzes the differences and similarities between the two countries' e-government systems through the Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. Data were collected through documentary studies of e-government policies, regulations, and evaluation reports, in-depth interviews with key stakeholders, and direct observation of government digital platforms such as SPBE Indonesia and myGov Australia. The results indicate that Australia has a more mature and integrated e-government system, with service penetration reaching 90% of the population, supported by a robust digital infrastructure, highly competent human resources, and a solid governance structure through the Digital Transformation Agency. In contrast, Indonesia still faces various challenges such as a digital infrastructure gap between urban and rural areas, fragmented systems that are not yet optimally integrated, weak coordination between agencies, and diverse digital literacy levels. Nevertheless, Indonesia has shown significant progress through innovative approaches such as the development of mobile-first applications and partnerships with the local private sector that are adaptive to local contexts and limitations. This study recommends that Indonesia gradually accelerate digital infrastructure development, increase the capacity of civil servants through ongoing training programs, strengthen governance structures with clearer authority, and adopt a user-centric design approach in developing government digital services. The research findings contribute to the e-government literature by demonstrating that contextual factors such as socio-economic conditions, geographic characteristics, and institutional capacity play a crucial role in determining e-government implementation strategies and outcomes. Therefore, best practices cannot be directly transferred without substantive adaptation to local contexts.

Keywords: e-government, digital transformation, Indonesia-Australia comparison, TOE Framework, digital public services, SPBE, myGov, e-government

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji perbandingan implementasi e-government antara Indonesia dan Australia untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital pemerintahan di kedua negara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif, penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan e-government kedua negara melalui kerangka Technology-Organization-Environment (TOE) Framework. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan, regulasi, dan laporan evaluasi e-government, wawancara mendalam dengan stakeholder kunci, serta observasi langsung terhadap platform digital pemerintah seperti SPBE Indonesia dan myGov Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memiliki sistem e-government yang lebih matang dan terintegrasi dengan penetrasi layanan mencapai 90% populasi, didukung oleh infrastruktur digital yang kuat, kompetensi SDM aparatur yang tinggi, dan governance structure yang solid melalui Digital Transformation Agency. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai



tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah urban dan rural, fragmentasi sistem yang belum terintegrasi optimal, koordinasi antar instansi yang lemah, serta literasi digital masyarakat yang masih beragam. Meskipun demikian, Indonesia menunjukkan progress signifikan dengan pendekatan inovatif seperti pengembangan aplikasi mobile-first dan partnership dengan sektor swasta lokal yang adaptif terhadap konteks dan keterbatasan lokal. Penelitian ini merekomendasikan Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital secara bertahap, meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui program pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat governance structure dengan authority yang lebih jelas, serta mengadopsi pendekatan user-centric design dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Temuan penelitian memberikan kontribusi terhadap literatur e-government dengan menunjukkan bahwa faktor kontekstual seperti kondisi sosial-ekonomi, karakteristik geografis, dan kapasitas institusi memainkan peran krusial dalam menentukan strategi dan outcome implementasi e-government, sehingga best practices tidak dapat ditransfer langsung tanpa adaptasi substantif sesuai konteks lokal.

Kata Kunci: e-government, transformasi digital, perbandingan Indonesia- Australia, TOE Framework, layanan publik digital, SPBE, myGov, pemerintahan elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. E-government, sebagai implementasi teknologi digital dalam layanan publik, kini menjadi kebutuhan mendasar bagi Negara-negara modern untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan transparansi pemerintah. Di era digital seperti sekarang, hampir semua negara berlomba-lomba mentransformasi layanan publiknya ke platform digital, tiak terkecuali di Indonesia dan Austraalia yang memiliki pendekatan berbeda dalam mengimplementasikan system e-government mereka (Ladia et al., 2025).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan e-government. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai platform digital seperti aplikasi e-KTP, LAPOR, dan Sistem Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, masih banyak kendala yang dihadapi mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, hingga persoalan koordinasi antar lembaga pemerintahan (Nugroho & Purbokusumo, 2020). Kondisi ini membuat e-government di Indonesia berjalan lambat dan belum optimal meskipun potensi manfaat sangat brsar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, Australia sebagai negara maju telah menunjukkan kesuksesan dalam implementasi e-government dengan sistem yang terintegrasi dan matang. Platform myGov yang menyatukan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal telah menjadi contoh praktik terbaik e-government di tingkat global. Australia berhasil mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan digital pemerintah berkat infrastruktur teknologi yang kuat, regulasi yang jelas dan budaya digital yang sudah mengakar di masyarakat (Rambe, 2022). Keberhasilan Australia dalam mengintegrasikan layanan publik digital ini menarik untuk dikaji sebagai bahan pembelajaran bagi negara-negara lain termasuk Negara Indonesia.

Perbandingan antar kedua negara ini menjadi relevan mengingat keduanya merupakan mitra strategis di kawasan Asia-Pasifik dalam konteks social, ekonomi dan politik yang berbeda. Indonesia yang sedang dalam fase transformasi digital nasional membutuhkan rujukan praktik terbaik dari negara-negara yang lebih dulu berhasil. Sementara itu, Australia dengan sistem e-government yang sudah mapan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanannya dan menghadapi tantangan baru seperti keamanan siber dan perlindungan data pribadi (Rambe, 2022).

Penelitian menjadi penting karena Indonesia saat ini sedang gencar mendorong program transformasi digital sector publik melalui roadmap SPBE 2025 dan berbagai inisiatif digitalisasi layanan pemerintah. Dengan mempelajari pengalaman Australia yang lebih matang dalam e-government, Indonesia dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang mungkin diadaptasi sesuai konteks lokal untuk mempercepat transformasi digital pemerintah. Di sisi lain, studi juga dapat memberikan perspektif bagi Australia tentang tantangan unik yang dihadapi negara berkembang dalam mengimplementasikan e-government, yang berguna untuk kerjasama bilateral dan program bantuan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk membandingkan implementasi e-government di Indonesia dan Australia. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan untuk kebutuhan memahami secara mendalam bagaimana kedua negara menerapkan sistem pemerintahan digitalnya, proses pelaksanaan di lapangan, serta tantangan yang dihadapi. Metode komparatif memungkinkan peneliti tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasinya.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan ini adalah Technology-Organization-Environment (TOE) Framework yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan adopsi teknologi di organisasi pemerintahan dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: konteks teknologi yang mencakup infrastruktur dan platform digital yang digunakan, konteks organisasi yang meliputi birokrasi dan kapasitas sumber daya manusia, serta konteks lingkungan yang mencakup kebijakan pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, dan tingkat kesiapan masyarakat. Framework ini memberikan lensa analisis yang komprehensif untuk membandingkan e-government di kedua negara yang memiliki karakteristik berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum E-Government Indonesia

a. Kebijakan Regulasi E-Government Indonesia

Kerangka regulasi e-government Indonesia dibangun diatas beberapa peraturan perundangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 11

As-Sulthan Journal Of Education (ASJE)

<https://ojssulthan.com/asje>

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi digital dalam transaksi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik sitasi. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan berbagai layanan digital dengan kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan regulasi kunci yang mengatur secara rinci bagaimana pemerintah elektronik harus dijalankan di Indonesia. Perpres ini mengamanatkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan SPBE dengan sadar dan terstruktur yang telah ditetapkan termasuk kewajiban untuk berbagi data dan mengintegrasikan sistem (Firmadi & Nugraha, 2025).

b. Platform dan aplikasi e-government di Indonesia

Indonesia telah mengembangkan berbagai platform dan aplikasi e-government untuk melayani kebutuhan masyarakat. Portal Satu Data Indonesia menjadi platform utama yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, memungkinkan akses terbuka terhadap data pemerintah untuk mendukung transparansi dan pemanfaatan data oleh publik. Ditingkatkan layanan publik, aplikasi seperti e-KTP untuk identitas kependudukan, DJP Online untuk perpajakan, OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha, dan LAPOR untuk pengaduan masyarakat telah menjadi bagian penting dari ekosistem e-government Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi yang dikembangkan saat pandemic COVID-19 menunjukkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam merespon situasi darurat dengan solusi digital yang dapat diadopsi secara massif dalam waktu singkat (Wijaya, 2021).

Pemerintah juga telah meluncurkan aplikasi identitas digital nasional bernama IKN (identitas kependudukan nasional) yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah hanya dengan satu akun digital. Sistem administrasi pemerintahan seperti e-office untuk pengelolaan surat menyurat elektronik dan SAKTI untuk sistem keuangan negara telah diterapkan di hampir seluruh instansi pemerintah pusat (Sukorina, 2025). Namun implementasi ditingkat daerah masih beragam tergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing pemerintahan daerah dalam mengadopsi sistem tersebut.

2. Struktur organisasi dan tata kelola di Indonesia

Tata kelola e-government di Indonesia melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dengan peran yang berbeda-beda. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan siber, sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi fokus pada reformasi birokrasi dan evaluasi implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah (Firmadi & Nugraha, 2025). Koordinasi antara kedua kementerian ini menjadi kunci dalam

memastikan aspek teknologi dan aspek kelembagaan berjalan selaras dalam implementasi e-government.

3. Gambaran Umum E-Government Australia

a. Kebijakan Dan Regulasi E-Governance Australia

Kerangka kebijakan e-government Australia dibangun berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan user-centric design. Digital Transformation Strategy yang diluncurkan pada tahun 2018 menetapkan visi jelas tentang pemerintahan digital yang mengutamakan kebutuhan pengguna dan berbasis data dalam pengambilan keputusan (Yang & Berkembang, 2025). Strategi ini menekankan pentingnya desain layanan yang sederhana, cepat, dan aman, dengan menempatkan pengalaman pengguna sebagai prioritas utama dalam setiap pengembangan sistem pemerintahan digital.

Australia memiliki kerangka regulasi yang komprehensif untuk melindungi data dan privasi warga negara dalam ekosistem digital. Privacy Act 1988 yang telah beberapa kali diamandemen memberikan perlindungan kuat terhadap informasi pribadi dan mengatur bagaimana instansi pemerintah boleh mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data warga negara. Regulasi ini dilengkapi dengan Australian Privacy Principles yang memberikan panduan detail tentang penanganan data pribadi, memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data mereka.

b. Platform Dan Aplikasi E-Government Australia

MyGov merupakan platform flagship e-government Australia yang telah menjadi model bagi banyak negara lain. Platform ini mengintegrasikan layanan dari Australian Taxation Office (ATO), Services Australia, Department of Health, dan berbagai instansi lainnya dalam satu portal dengan single sign-on (Yang & Berkembang, 2025). Dengan lebih dari 23 juta akun aktif, myGov telah menjadi pintu gerbang utama masyarakat Australia untuk mengakses layanan pemerintah, mulai dari mengurus pajak, klaim kesehatan, tunjangan sosial, hingga layanan ketenagakerjaan.

Sistem identitas digital Australia yang dikenal dengan myGovID memberikan metode autentikasi yang aman dan mudah digunakan untuk mengakses layanan pemerintah dan sektor swasta. Sistem ini menggunakan teknologi verifikasi biometrik dan dokumen digital yang memungkinkan pengguna membuktikan identitas mereka secara online dengan tingkat keamanan yang tinggi. MyGovID telah diadopsi tidak hanya untuk layanan pemerintah federal, tetapi juga oleh pemerintah negara bagian dan sektor swasta, menciptakan ekosistem identitas digital yang interoperable.

Di tingkat negara bagian dan teritori, Australia juga memiliki berbagai platform e-government yang terintegrasi dengan baik dengan sistem federal. Service NSW misalnya, menyediakan akses ke lebih dari 900 layanan pemerintah negara bagian New South Wales melalui aplikasi mobile yang user-friendly. Platform ini memungkinkan warga untuk mengurus perpanjangan SIM, membayar denda, mendaftarkan kelahiran, dan berbagai layanan lainnya dengan mudah melalui smartphone mereka, menunjukkan bagaimana e-government

dapat benar-benar mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat (Wijaya, 2021).

c. Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Di Australia

Digital Transformation Agency (DTA) berperan sebagai pemimpin dan koordinator transformasi digital di seluruh pemerintahan Australia. DTA tidak hanya menetapkan standar dan kebijakan, tetapi juga menyediakan platform dan layanan bersama yang dapat digunakan oleh berbagai instansi pemerintah, mengurangi duplikasi dan meningkatkan efisiensi (Sukorina, 2025). Agensi ini bekerja sama erat dengan instansi pemerintah lainnya untuk memastikan konsistensi dalam desain, keamanan, dan pengalaman pengguna di seluruh layanan digital pemerintah.

Koordinasi antara pemerintah federal, negara bagian, dan teritori di Australia berlangsung melalui berbagai forum dan mekanisme kolaborasi. Council of Australian Governments (COAG) yang sekarang menjadi National Cabinet memfasilitasi koordinasi kebijakan digital lintas tingkat pemerintahan. Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun Australia memiliki sistem federal dengan otonomi yang cukup besar untuk negara bagian, implementasi e-government tetap berjalan harmonis dan terkoordinasi dengan baik (Alfaridzah et al., 2025)

4. Analisis Perbandingan Berdasarkan Konteks Lingkungan

a. Infrastruktur Teknologi Informasi

Perbedaan infrastruktur teknologi antara Indonesia dan Australia sangat mencolok dan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas implementasi e-government. Australia memiliki penetrasi internet yang mencapai 96% dari total populasi dengan kecepatan rata-rata yang jauh lebih tinggi, sementara Indonesia masih berkutat dengan penetrasi internet sekitar 73% dengan kualitas koneksi yang sangat beragam antar wilayah (Yang & Berkembang, 2025) Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia sangat lebar, dimana daerah-daerah terpencil di Indonesia Timur masih menghadapi keterbatasan serius dalam akses internet, membuat layanan e-government sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Kapasitas data center dan infrastruktur cloud computing juga menunjukkan perbedaan signifikan. Australia telah berinvestasi besar dalam membangun data center modern dengan standar keamanan tinggi dan kapasitas yang memadai untuk menangani volume transaksi yang besar (Henderson & Kumar, 2023). Pemerintah Australia juga telah mengadopsi strategi cloud-first dimana layanan baru diprioritaskan untuk dibangun di atas infrastruktur cloud, meningkatkan skalabilitas dan mengurangi biaya infrastruktur jangka panjang.

Indonesia masih dalam proses membangun infrastruktur data center nasional yang memadai, dengan Pusat Data Nasional (PDN) yang baru mulai beroperasi penuh dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemerintah telah menginvestasikan dana cukup besar, kapasitas dan kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk dapat menangani kebutuhan seluruh instansi pemerintah (Rambe, 2022). Ketergantungan pada penyedia layanan cloud swasta

juga menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan data dan keamanan informasi pemerintah yang sensitif.

b. Kualitas Platform E-Government

Dari segi user interface dan user experience, platform e- government Australia umumnya lebih unggul dibandingkan Indonesia. MyGov dirancang dengan pendekatan user-centric yang melibatkan pengguna sejak tahap awal pengembangan, menghasilkan antarmuka yang intuitif dan mudah dinavigasi bahkan oleh pengguna yang tidak familiar dengan teknologi (Nugroho & Purbokusumo, 2020). Desain yang konsisten di seluruh layanan pemerintah Australia memberikan pengalaman yang seamless bagi pengguna, mengurangi kurva pembelajaran ketika mengakses layanan baru.

Platform e-government Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi dalam hal desain dan pengalaman pengguna. Banyak aplikasi pemerintah yang dikembangkan dengan standar desain berbeda-beda, membuat pengguna harus beradaptasi dengan interface yang berbeda setiap kali mengakses layanan yang berbeda. Meskipun beberapa aplikasi seperti PeduliLindungi menunjukkan desain yang baik, secara keseluruhan ekosistem e-government Indonesia masih perlu perbaikan signifikan dalam aspek user experience.

Keamanan sistem menjadi aspek krusial yang membedakan kedua negara. Australia memiliki framework keamanan siber yang sangat ketat dengan Australian Cyber Security Centre (ACSC) yang secara aktif memantau dan merespons ancaman terhadap infrastruktur digital pemerintah (Sugiartini et al., 2024). Semua sistem pemerintah harus melalui assessment keamanan yang ketat sebelum dapat dioperasikan. Indonesia melalui BSSN juga telah mengembangkan framework keamanan siber, namun implementasinya masih belum merata di seluruh instansi pemerintah, dengan beberapa insiden keamanan yang terjadi pada sistem pemerintah menunjukkan masih adanya kerentanan yang perlu diperbaiki.

c. Inovasi dan Adopsi Teknologi Baru

Australia menunjukkan tingkat inovasi yang lebih tinggi dalam mengadopsi teknologi emerging untuk meningkatkan layanan e- government. Penggunaan artificial intelligence dan machine learning telah diterapkan dalam berbagai layanan, seperti chatbot yang dapat menjawab pertanyaan warga secara otomatis, sistem prediksi untuk mendeteksi fraud dalam klaim tunjangan sosial, dan analitik data untuk mengoptimalkan delivery layanan publik. DTA secara aktif melakukan eksperimen dengan teknologi baru dan menyediakan sandbox untuk instansi pemerintah mencoba inovasi dengan risiko terkontrol.

Indonesia juga mulai mengeksplorasi penggunaan AI dalam e- government, namun adopsinya masih terbatas pada beberapa proyek pilot di instansi tertentu. Chatbot untuk layanan pengaduan masyarakat dan sistem analitik untuk deteksi fraud pajak merupakan contoh penerapan AI yang sudah berjalan, namun skalanya masih terbatas (Alfaridzah et al., 2025). Keterbatasan data berkualitas tinggi dan kapasitas SDM yang memahami teknologi AI menjadi hambatan utama dalam percepatan adopsi teknologi ini di Indonesia.

Mobile government atau m-government merupakan area dimana Indonesia menunjukkan progress yang cukup baik. Tingginya penetrasi smartphone di Indonesia mendorong banyak instansi pemerintah mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan mereka (Purnomo & Wijayanti, 2024). Aplikasi seperti PeduliLindungi, Mobile JKN, dan berbagai aplikasi daerah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memahami pentingnya mobile-first approach. Australia juga sangat fokus pada mobile government dengan aplikasi seperti myGov mobile dan Service NSW yang sangat populer di kalangan pengguna (Sugiartini et al., 2024)

5. Analisis Perbandingan Berdasarkan Konteks Organisasi

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas SDM aparatur menjadi faktor kritis yang membedakan tingkat keberhasilan e-government di kedua negara. Australia memiliki civil service dengan tingkat kompetensi digital yang secara umum lebih tinggi, didukung oleh sistem rekrutmen yang selektif dan program pengembangan kapasitas yang terstruktur. Australian Public Service Commission secara aktif menyelenggarakan program pelatihan digital untuk aparatur di semua level, memastikan bahwa pegawai pemerintah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem digital (Alfaridzah et al., 2025).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kompetensi digital aparatur. Survei yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur sipil negara masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah hingga menengah (Ladia et al., 2025). Gap generasi juga menjadi isu, dimana aparatur senior yang menduduki posisi pengambil keputusan sering kali kurang familiar dengan teknologi digital, sementara aparatur muda yang lebih tech-savvy berada di posisi yang kurang strategis.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi digital di Indonesia sudah mulai digalakkan melalui berbagai inisiatif seperti Akademi ASN dan pelatihan-pelatihan khusus tentang SPBE. Namun, jangkauan program ini masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh aparatur yang membutuhkan (Rambe, 2022). Tingginya turnover dan mutasi pegawai juga membuat investasi dalam pelatihan sering kali tidak optimal karena pegawai yang sudah terlatih dipindahkan ke posisi lain yang tidak terkait dengan digital.

Ketersediaan tenaga ahli IT di sektor pemerintahan juga menunjukkan perbedaan signifikan. Australia mampu menarik talenta IT terbaik untuk bekerja di sektor publik dengan menawarkan remunerasi kompetitif dan lingkungan kerja yang inovatif. DTA dan berbagai instansi pemerintah Australia memiliki tim IT internal yang kuat dengan keahlian tinggi. Indonesia menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan talenta IT karena gap remunerasi yang besar antara sektor publik dan swasta, sehingga banyak bergantung pada vendor eksternal untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem (Ladia et al., 2025).

Struktur birokrasi Australia cenderung lebih flat dan fleksibel dibandingkan Indonesia, memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan. Budaya inovasi sangat didorong dalam public service Australia, dimana pegawai diberikan ruang untuk bereksperimen dan mengambil risiko terkalkulasi dalam mengembangkan solusi baru (Thompson & Wilson, 2024). Kegagalan dalam eksperimen tidak dilihat sebagai hal negatif, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi.

Birokrasi Indonesia masih cenderung hirarkis dengan banyak layer dalam proses pengambilan keputusan. Struktur ini sering kali memperlambat implementasi inisiatif digital karena membutuhkan approval dari berbagai tingkatan sebelum keputusan dapat dieksekusi. Budaya risk-averse juga masih dominan dimana aparaturnya cenderung menghindari mengambil keputusan yang berpotensi kontroversial, lebih memilih mengikuti prosedur yang sudah mapan meskipun kurang efisien.

b. Kepemimpinan dan Komitmen Politik

Dukungan kepemimpinan politik merupakan faktor krusial dalam kesuksesan e-government, dan Australia menunjukkan komitmen yang lebih konsisten lintas periode pemerintahan. Transformasi digital telah menjadi agenda bipartisan yang didukung oleh berbagai partai politik, memastikan kontinuitas program meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Rambe, 2022). Para pemimpin politik Australia secara aktif mempromosikan agenda digital dan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk inisiatif transformasi digital.

Di Indonesia, komitmen politik terhadap e-government cukup kuat terutama sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menjadikan digitalisasi sebagai salah satu prioritas. Namun, kontinuitas program sering terganggu oleh pergantian kepemimpinan di level kementerian atau daerah yang membawa agenda prioritas masing-masing (Firmansyah & Santoso, 2023). Program e-government yang sudah berjalan di suatu daerah kadang dihentikan atau diganti ketika terjadi pergantian kepala daerah, menunjukkan kurangnya institusionalisasi program.

Kepemimpinan di tingkat teknis juga memainkan peran penting. DTA dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) dengan latar belakang kuat di bidang teknologi dan transformasi digital, memberikan kredibilitas dan kemampuan teknis dalam memimpin agenda transformasi (Ladia et al., 2025). Di Indonesia, kepemimpinan instansi yang menangani e-government sering berganti dan tidak selalu diisi oleh orang dengan keahlian spesifik di bidang teknologi digital, yang dapat mempengaruhi arah dan efektivitas program (Firmadi & Nugraha, 2025).

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Australia memang punya pendekatan yang cukup berbeda dalam menjalankan sistem e-government mereka. Australia sudah lebih dulu melangkah dengan infrastruktur digital yang matang dan terintegrasi dengan baik, sementara Indonesia masih dalam proses pengembangan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Meskipun begitu, perjalanan Indonesia patut diapresiasi karena sudah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir dengan berbagai inovasi layanan publik digital yang makin memudahkan masyarakat.

Kedua negara ini sebenarnya bisa saling belajar satu sama lain. Indonesia bisa mengadopsi sistem integrasi data yang sudah diterapkan Australia, sedangkan Australia mungkin bisa melihat bagaimana Indonesia berinovasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel menghadapi tantangan infrastruktur yang beragam. Yang paling penting, transformasi digital pemerintahan ini bukan sekadar soal teknologi canggih, tapi bagaimana layanan publik bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama semua pihak, masa depan e-government di kedua negara ini punya potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaridzah, A. L., Firlana, H., & Astuti, R. K. (2025). IMPLEMENTASI DAN DAMPAK SISTEM MANAJEMEN SDM BERBASIS E-GOVERNMENT DI INDONESIA. 11(1), 145-156.
- Firmadi, S., & Nugraha, B. (2025). Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia : Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah. 6(4), 444-450.
- Ladia, F., Rosinta, M., Suryani, & samosir, tetti. (2025). Farhatin Ladia, et al. P.ISSN Number 2337-7216, E ISSNNumber 2620-6625. 2337, 930-938.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness : Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia E-Government Readiness : Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia. 22(1), 1-17.
- Rambe, M. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. 1(3), 232-248.
- Sugiartini, P., Tamamiyah, L., Cirebon, U. M., Islam, U., Bangsa, B., & Publik, A. (2024). INISIATIF E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN. 8(4), 950-955.
- Sukorina, D. (2025). Good Governance di Era Digital : Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia. 8(1), 220-234.
- Wijaya, J. H. (2021). GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN E - GOVERNMENT DI INDONESIA. 3(2), 197-204.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.12127>

Yang, D. A. N., & Berkembang, D. (2025). PERBANDINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA DUNIA YANG MENGAKU MAJU. *Aiccon*, 193–198.